

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN & KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI



VIRCELLIS DIONISIUS TONAPA

12180411

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

VIRCELLIS DIONISIUS TONAPA

12180411

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vircellis Dionisius Tonapa
NIM : 12180411
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten & Kota di Sulawesi Selatan”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 November 2024

Yang menyatakan



(Vircellis Dionisius Tonapa)

NIM.12180411

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN & KOTA DI SULAWESI SELATAN”

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

VIRCELLIS DIONISIUS TONAPA

12180411

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

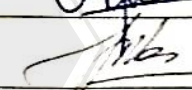
Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal (6 Agustus 2024)

Nama Dosen

1. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak., CA.
(Ketua Tim Penguji)
2. Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt., CA
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si
(Dosen Pembimbing)

Tanda Tangan



Yogyakarta, 06 Agustus 2024

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangran, SE., M. Si.



Rossalina Christianti, S.E., M.Acc

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN & KOTA DI SULAWESI SELATAN”**

Yang telah saya kerjakan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di perguruan atau instansi manapun, kecuali bagian sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2024



Vircellis D Tonapa

12180411

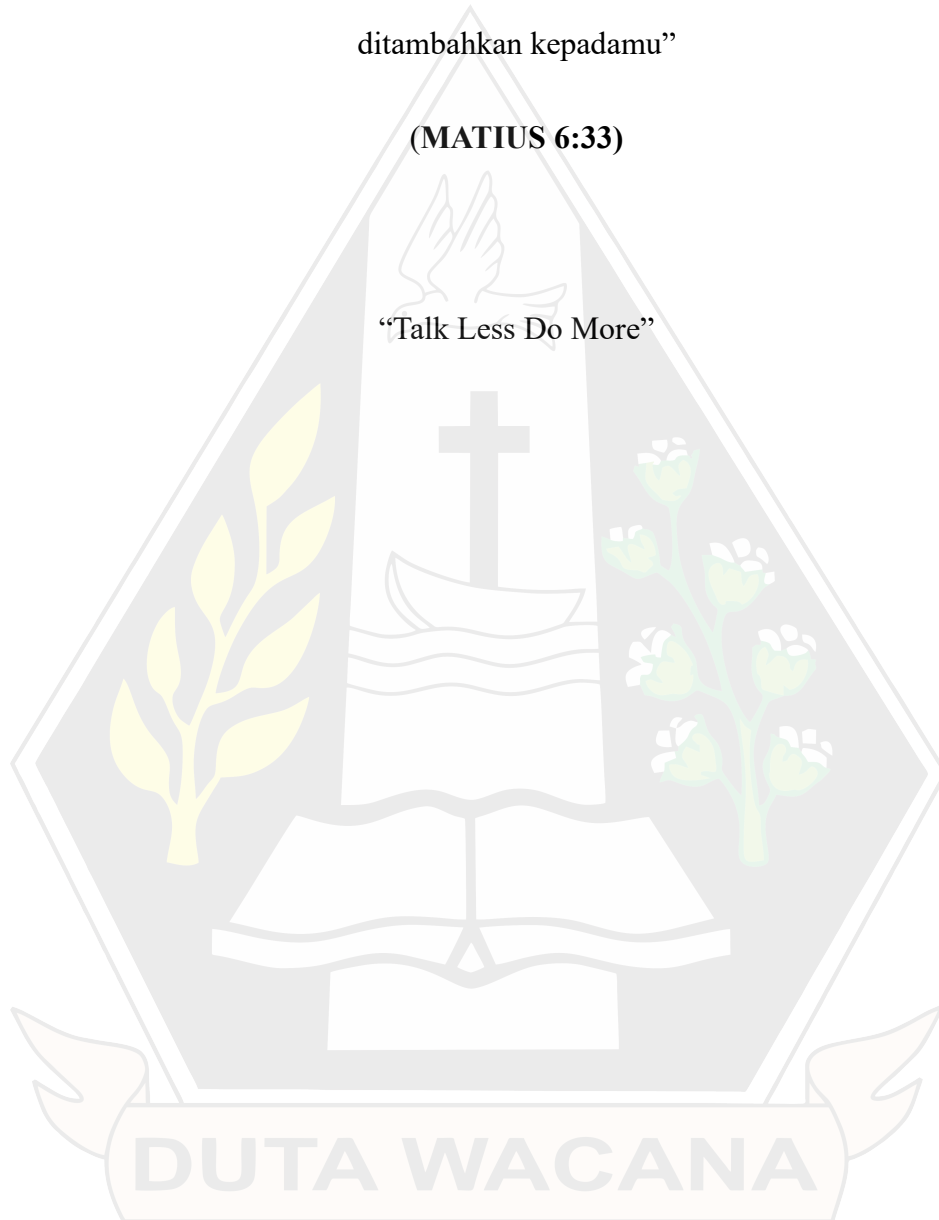
DUTA WACANA

HALAMAN MOTTO

“Tetapi carilah dulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu”

(MATIUS 6:33)

“Talk Less Do More”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan segala hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan seluruh proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis skripsi ini mempersembahkan dengan bangga dan penuh rasa ucapan syukur kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Nya, penulis bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesainya
2. Untuk Bapak dan Mama yang sudah selalu mendukung saya dalam segala suka duka dalam seluruh proses penulisan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing saya Ibu Xaveria Indri Prasasyaningsih yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Saudara/i, Virginia Dianessa Tonapa dan Virginio Paul Tonapa.
5. Teman-teman seperjuangan, dan setempat tinggal.
6. Emelinda Somba Pasinggi. TY
7. Keluarga besar
8. Gappala Duta Wacana
9. Dan semua pihak yang sudah terlibat selama proses ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan”. Sebagaimana diketahui, penyusunan penulisan skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam proses penulisan penelitian, penulis menyadari bahwa setiap proses penulisan dari awal sampai akhir tidak mudah, maka dari itu, penulis mengucapkan Terima kasih kepada Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si, selaku dosen pembimbing yang mendampingi dan memberikan arahan dalam penyusunan penulisan penelitian.

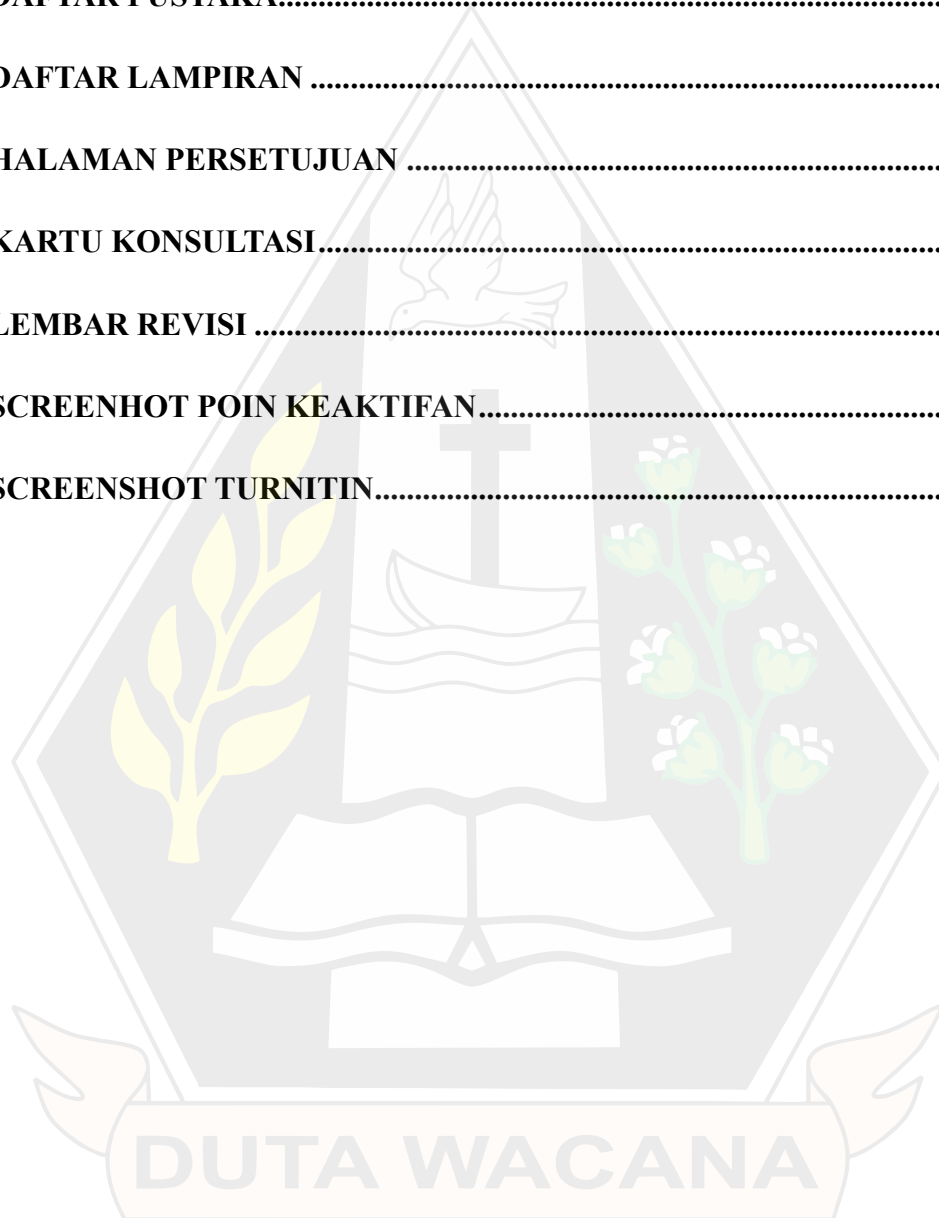
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan penulisan penelitian ini, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Penulis berharap penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
ABSTRAK	XII
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Komponen dan Tautan	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kontribusi Penelitian.....	8
1.6 Batasan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Keagenan	10
2.1.2 Otonomi Daerah	11
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11

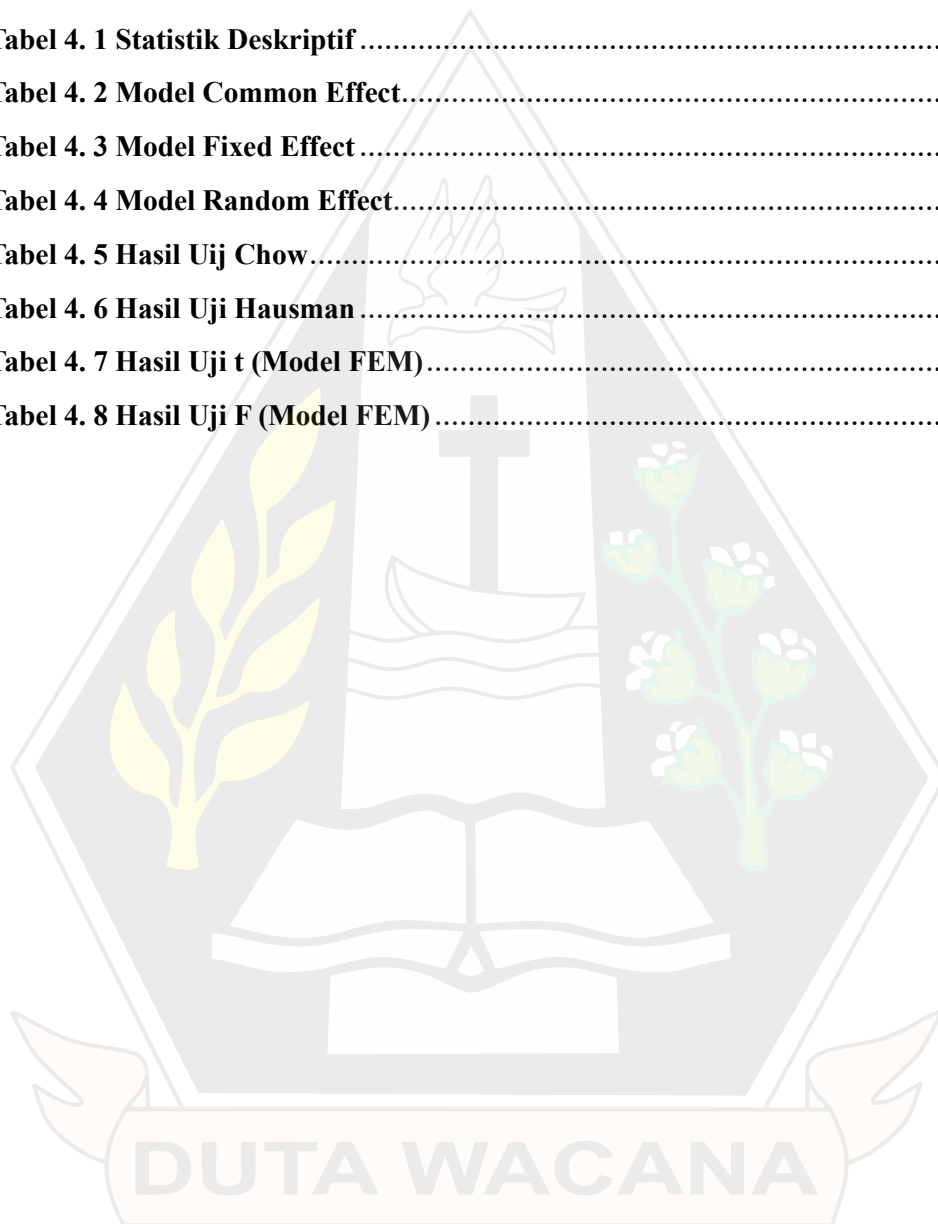
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Pengembangan Hipotesis	22
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	22
2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	22
2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	25
3.3.1 Variabel Independen.....	25
3.3.2 Variabel Dependen	27
3.4 Desain Penelitian.....	27
3.5 Metode Analisis Data	28
3.5.1 Statistik Dekriptif	28
3.5.2 Analisis Data Panel	28
1. Uji Chow	31
2. Uji Hausman	32
3. Uji Lagrange Multiplier (LM).....	32
3.5.3 Uji Hipotesis	33
BAB IV	35
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	35
4.2 Analisis Regresi Data Panel	36
4.3 Uji Hipotesis	40
4.3.1 Uji Parsial (Uji-t).....	40
4.3.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	42
4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (<i>R</i>²).....	43
4.4 Pembahasan.....	43
4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal (BM)	43
4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (BM)	45
4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal (BM)	46

BAB V.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	50
5.3 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR LAMPIRAN	56
HALAMAN PERSETUJUAN	65
KARTU KONSULTASI.....	66
LEMBAR REVISI	67
SCREENHOT POIN KEAKTIFAN.....	68
SCREENSHOT TURNITIN.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	35
Tabel 4. 2 Model Common Effect.....	37
Tabel 4. 3 Model Fixed Effect	37
Tabel 4. 4 Model Random Effect.....	38
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	38
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman	39
Tabel 4. 7 Hasil Uji t (Model FEM).....	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji F (Model FEM)	42



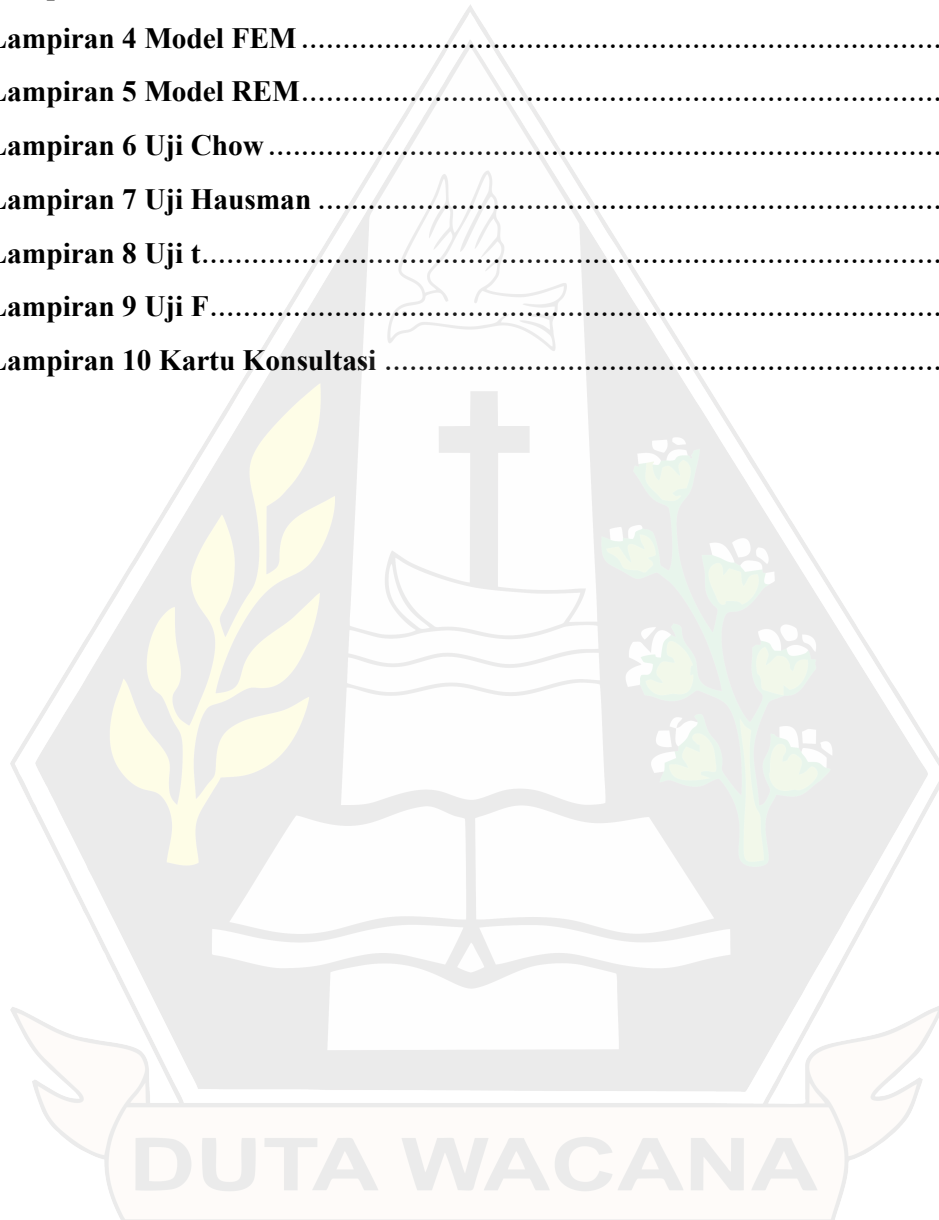
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komponen dan Tautan.....	7
Gambar 2. 1 Desain Penelitian	27
Gambar 4. 1 Kerangka Pengambilan Keputusan	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	56
Lampiran 2 Statistik Deskriptif.....	61
Lampiran 3 Model CEM.....	62
Lampiran 4 Model FEM	62
Lampiran 5 Model REM.....	63
Lampiran 6 Uji Chow	63
Lampiran 7 Uji Hausman	63
Lampiran 8 Uji t.....	64
Lampiran 9 Uji F.....	64
Lampiran 10 Kartu Konsultasi	66



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten & Kota di Sulawesi Selatan

Vircellis D Tonapa

12180411

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

vircellisdion16@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka secara mandiri, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal sebagai salah satu indikator pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan daerah dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial, PAD tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan DAU dan DAK juga menunjukkan pengaruh positif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

***The Effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and
Special Allocation Fund on Capital Expenditure of Districts & Cities in
South Sulawesi***

Vircellis D Tonapa

12180411

Accounting Study Program, Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

vircellisdion16@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on capital expenditure in districts and cities in South Sulawesi Province. Regional autonomy implemented in Indonesia provides an opportunity for regions to manage their financial resources independently, so it is important to understand the factors that influence capital expenditure as an indicator of regional development. The method used in this research is multiple regression analysis with secondary data obtained from regional financial reports and official government documents. The results showed that PAD, DAU, and DAK simultaneously had a significant effect on capital expenditure. Partially, PAD has no significant effect, while DAU and DAK also show a positive effect. The findings are expected to contribute to decision making in regional financial management, as well as being a reference for further research in the field of accounting and regional financial management.

Keywords: Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya di Indonesia ditetapkan adanya otonomi daerah yang menjadi salah satu upaya untuk diberlakukannya pemberdayaan daerah dalam meningkatkan pembangunan, inovasi, aspirasi, dan kemandirian. Otonomi daerah merupakan hal penting yang harus dilakukan karena menjadi salah satu penyelenggaraan negara sebagai bentuk penerapan sistem demokrasi. Perwujudan sistem demokrasi melalui otonomi daerah ini menjadi suatu solusi dari berbagai tuntutan dan keluhan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu mendorong kemandirian mengelola sumber daya dan manusia di wilayah masing-masing. Peraturan otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, “Otonomi daerah memberi kesempatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola daerahnya masing-masing”.

Indonesia kini menerapkan otonomi daerah yang menjadi wujud dari *New Public Management* atau dikenal dengan sistem desentralisasi (Diva Ivana et al., 2021). Otonomi daerah mempunyai hubungan yang sejalan dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah konsep pengalokasian kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab pemerintah pusat dipindahkan ke pemerintah daerah (pemda). Di masa desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan bisa memperbaiki

pelayanan umum yang menjamin kehidupan masyarakat yang layak. Hal ini juga bisa menjadi perwujudan demokratisasi dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tatanan pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi ini memudahkan masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan daerah dan memberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Salah satu jenis desentralisasi yang ada adalah desentralisasi fiskal, yang mempunyai kewajiban pada daerah untuk menghasilkan pendapatan, mendapatkan bantuan dana perimbangan dan menentukan investasi dan belanja wajib yang bersifat rutin (Litvack, 1999).

Menurut (Khusaini, 2006), “Prinsip desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan setidaknya ada empat hal:

1. Memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi berarti kebebasan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
2. Otonomi yang sebenarnya berarti bahwa pemerintah daerah dapat dengan leluasa menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang-bidang tertentu yang nyata keberadaan, kebutuhan, pembangunan, kelangsungan hidup dan pembangunannya.
3. Tanggung jawab otonomi dapat diartikan sebagai hasil logis dari pemberian hak dan kekuasaan kepada daerah

4. Otonomi provinsi dibatasi pada (a) kewenangan antar kabupaten/kota; (b) kewenangan kabupaten/kota yang belum terpakai; (c) kewenangan tambahan sesuai dengan ketentuan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom”.

Dalam asas penyelenggaraan desentralisasi ini, sudah jelas aturan-aturan yang melekat dan bagaimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan terhadap otonomi daerahnya. Melalui desentralisasi, setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong aktivasi daerah guna meningkatkan, pendapatan, dan peningkatan kemampuan pengelolaan daerah.

Pembangunan daerah adalah sebuah proses yang memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan di suatu wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan adalah belanja modal. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap, bangunan, tanah, peralatan dan aset tidak berwujud, serta untuk pemeliharaan, pemeliharaan, perbaikan atau penyediaan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan komersial. (Simanjuntak Arthurs & Christina G Mithas, 2019). Dalam penyelenggaraan APBD, belanja modal menjadi komponen yang sangat penting.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah anggaran keuangan yang dibuat tahunan oleh pemda dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan secara keseluruhan. Dalam peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun APBD termasuk dalam tata cara mengelola sumber pemasukan. Ada beberapa prinsip yang harus dimuat dalam penyusunan APBD seperti akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keserasian dengan rencana pembangunan daerah, partisipasi masyarakat, dan *gender responsive*. Dalam menyusun laporan keuangannya pemerintah daerah (Pemda) mempunyai hak dan wewenang penuh dari awal hingga selesainya, mulai dari merencanakan, menyusun, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi berjalannya semua kegiatan. Semua rencana dan anggaran yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasar dari UU Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bagaimana landasan hukum untuk penyusunan, pengaturan dan pelaksanaan APBD tingkat daerah. Dalam penerapannya prinsip ini harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan daerahnya.

Pemerintah daerah berhak mengelola seluruh pendapatan daerah, termasuk pendapatan awal dan pendapatan perimbangan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Pajak, retribusi, dan perusahaan milik daerah adalah beberapa contoh kegiatan masyarakat daerah yang menghasilkan pendapatan yang disebut PAD”. UU ini tidak secara khusus mengatur tentang bagaimana pengelolaan PAD, namun secara

tidak langsung mempengaruhi dapat memengaruhi PAD. Penerimaan dana ini dapat berdampak pada kebijakan daerah tentang menetapkan dan mengelola PAD. Salah satu pemasukan terbesar bersumber dari pendapatan asli daerah. Pemda memiliki wewenang membuat ketentuan dan penetapan PAD seperti penetapan jenis, besaran tarif, dan cara memungut pajak dan retribusi daerah.

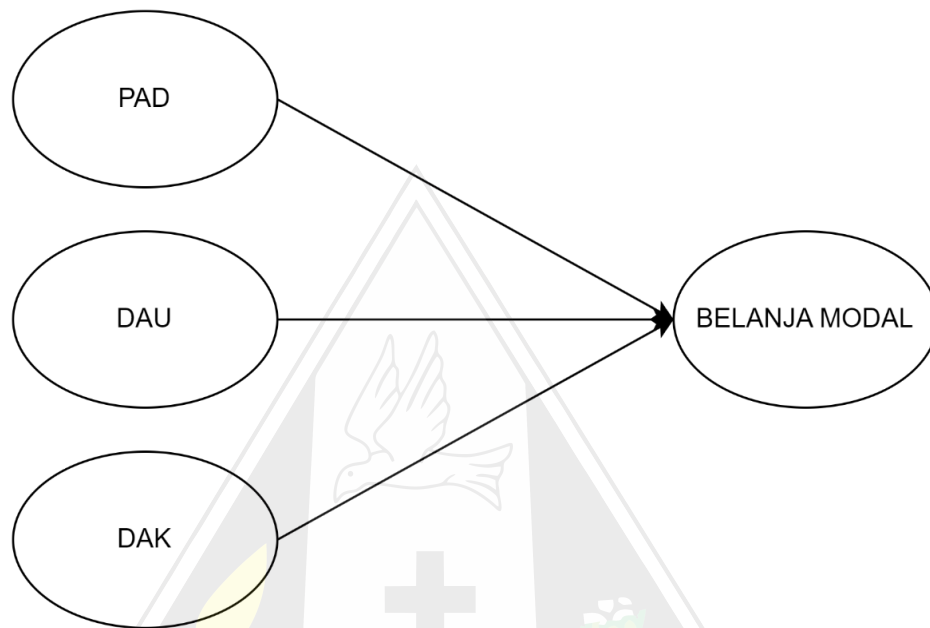
Dana alokasi umum (DAU) adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat yang bertujuan mempromosikan pemerataan ekonomi dan layanan publik setiap daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal seperti pengadaan, investasi pada bangunan, dan perbaikan infrastruktur jangka panjang . Pada dasarnya, penentuan nilai DAU adalah sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) yang ditetapkan dalam APBN. Kebijakan harus sesuai dengan kondisi dan situasi daerah saat ini (Dana Alokasi Umum, 2017).

Dana alokasi khusus (DAK) berasal dari pendapatan APBN, lalu dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan memenuhi prioritas nasional. Perhitungan alokasi DAK dilakukan dalam dua tahap: pertama, menentukan mana daerah yang berhak menerima DAK. Kedua, menentukan besaran nilai DAK yang dialokasikan untuk masing-masing daerah. Perhitungan ini dilakukan oleh menteri keuangan setelah menerima usulan kegiatan khusus. Penentuan daerah yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Dana Alokasi Khusus, 2017).

Saat ini, masalah yang sering terjadi di pemerintah daerah ialah pengalokasian sumber dana. Pemda harus bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan membelanjakan pendapatan yang didapatkan untuk belanja yang lebih efektif. Di beberapa daerah terdapat perbedaan antara pengeluaran belanja operasi dan belanja modal. Masalah perbedaan pengeluaran belanja operasi dan belanja modal bisa dikatakan tidak normal. Dengan adanya perbedaan besaran pengeluaran belanja yang ada, dapat mengindikasikan bahwa penerimaan daerah seperti investasi pada infrastruktur atau pada aset yang produktif masih sangat kurang. Hal ini akan memiliki kecenderungan untuk menjadi poin yang buruk bagi pemerintah daerah karena lebih fokus pada pengeluaran daripada pertumbuhan masa depan.

Kondisi keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini masih sangat rendah. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data yang diunggah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), bahwa rasio PAD terhadap APBD atau rasio kemandirian fiskal masih sangat kecil yaitu sekitar 20%. Hal ini mengartikan bahwa pendapatan yang diterima daerah sebagian besar didapatkan dari dana perimbangan. Akibat yang dihasilkan dari hal tersebut adalah pemda memiliki ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Masalah yang dihadapi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan adalah adanya ketimpangan fiskal dan kapasitas daerah yang mengacu pada lemahnya pengelolaan dana daerah dan program pembangunan yang efektif.

1.2 Komponen dan Tautan



Gambar 1. 1 Komponen dan Tautan

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK berdampak pada BM kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa

membantu pihak pemda untuk membuat kebijakan dan strategi yang tepat demi peningkatan keefektifan belanja modal dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Kontribusi Penelitian

1. Pemerintah

Sebagai bahan yang bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan belanja modal.

2. Masyarakat

Memberikan informasi tentang belanja modal Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

3. Akademisi

Meningkatkan wawasan pengetahuan tentang komponen-komponen yang mempengaruhi belanja modal.

1.6 Batasan Penelitian

1. Kurangnya penelitian tentang konsekuensi jangka panjang desentralisasi fiskal terhadap belanja modal: Sebagian besar penelitian berfokus pada efek desentralisasi fiskal terhadap belanja modal dalam jangka pendek. Namun, untuk menilai keberlanjutan hubungan tersebut, penting untuk diadada dalam jangka waktu yang lebih lama dan menggunakan metode ekonometrik yang tepat untuk memperhitungkan potensi pengganggu.
2. Kurangnya perhatian terhadap dampak yang berbeda dari jenis belanja modal yang berbeda: Belanja modal mencakup banyak hal, seperti investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Penelitian harus

menyelidiki efek yang berbeda dari desentralisasi fiskal terhadap berbagai jenis belanja modal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Analisis data dan pembahasan yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)

Analisis data didapati hasil tidak adanya pengaruh yang signifikan antara PAD dan Belanja Modal BM di kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Artinya, peningkatan PAD tidak secara langsung berdampak pada peningkatan BM. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penelitian ini seperti, porsi pendapatan PAD masih terlalu kecil, ketergantungan pada transfer pusat, dan perbedaan prioritas pembangunan.

Kontribusi PAD masih tergolong kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan lain, seperti dana perimbangan dari pusat. Ketergantungan pada transfer dana dari pusat ini menimbulkan kemungkinan bahwa peningkatan PAD tidak akan berdampak signifikan terhadap alokasi modal belanja. Hal ini disebabkan karena pemda masih berpotensi mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat sebagai pendanaan modal belanja. Dan faktor terakhir yang bisa mempengaruhi hasil penelitian adalah prioritas pembangunan daerah masing-masing.

Meskipun pengaruhnya tidak signifikan, namun arah hubungan positif antara PAD terhadap BM masih menunjukkan kecenderungan peningkatan PAD dapat menyebabkan peningkatan BM.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM)

Hasil penelitian ini mengungkap adanya pengaruh antara DAU dan belanja modal di kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Temuan ini menyiratkan bahwa pertumbuhan DAU memberikan kontribusi signifikan terhadap perluasan penanaman modal. Beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi hasil ini, termasuk peran penting DAU, dampak pemanfaatan DAU, dan konsekuensi pemerataan pembangunan.

DAU berperan penting dalam pembiayaan BM. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan masih sangat penting bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum daerah. Dampak positif dan signifikan DAU terhadap BM menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat efektif dalam menyelenggarakan DAU untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan pemerataan pembangunan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap BM di kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DAK secara signifikan mendorong peningkatan BM di seluruh wilayah. Ada beberapa faktor yang bisa

mempengaruhi hasil penelitian ini seperti, efektifitas DAK, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemerataan pembangunan.

Dampak positif dan signifikasi DAK terhadap BM menunjukkan bahwa DAK efektif mendorong pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas umum sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK juga untuk BM secara efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik daerah melalui infrastruktur dan fasilitas yang baik, dan juga DAK membantu mengurangi kesenjangan pembangunan terutama kepada daerah yang berkebutuhan khusus atau tertinggal.

Dari penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK), masih mempunyai peranan penting dalam mendorong BM kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Sementara itu PAD dalam mendorong BM masih belum signifikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dari hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Periode Penelitian: Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2018-2022, yang mungkin belum cukup untuk menjabarkan pengaruh-pengaruh variabel independen terhadap belanja modal.
2. Variabel Penelitian: Penelitian ini menjadi langkah awal untuk memahami determinan modal belanja, dan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan memasukkan faktor-faktor lain.

5.3 Saran

Sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa usulan yang diharapkan dapat diterima oleh pihak-pihak terkait:

1. Untuk Pemerintah Pusat

Diharapkan pemerintah pusat melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan transfer dana ke daerah, termasuk DAU dan DAK untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mendorong pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat perlu menyempurnakan formula perhitungan DAU dan DAK agar lebih mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah, serta mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan dan transfer.

2. Untuk Pemerintah Daerah

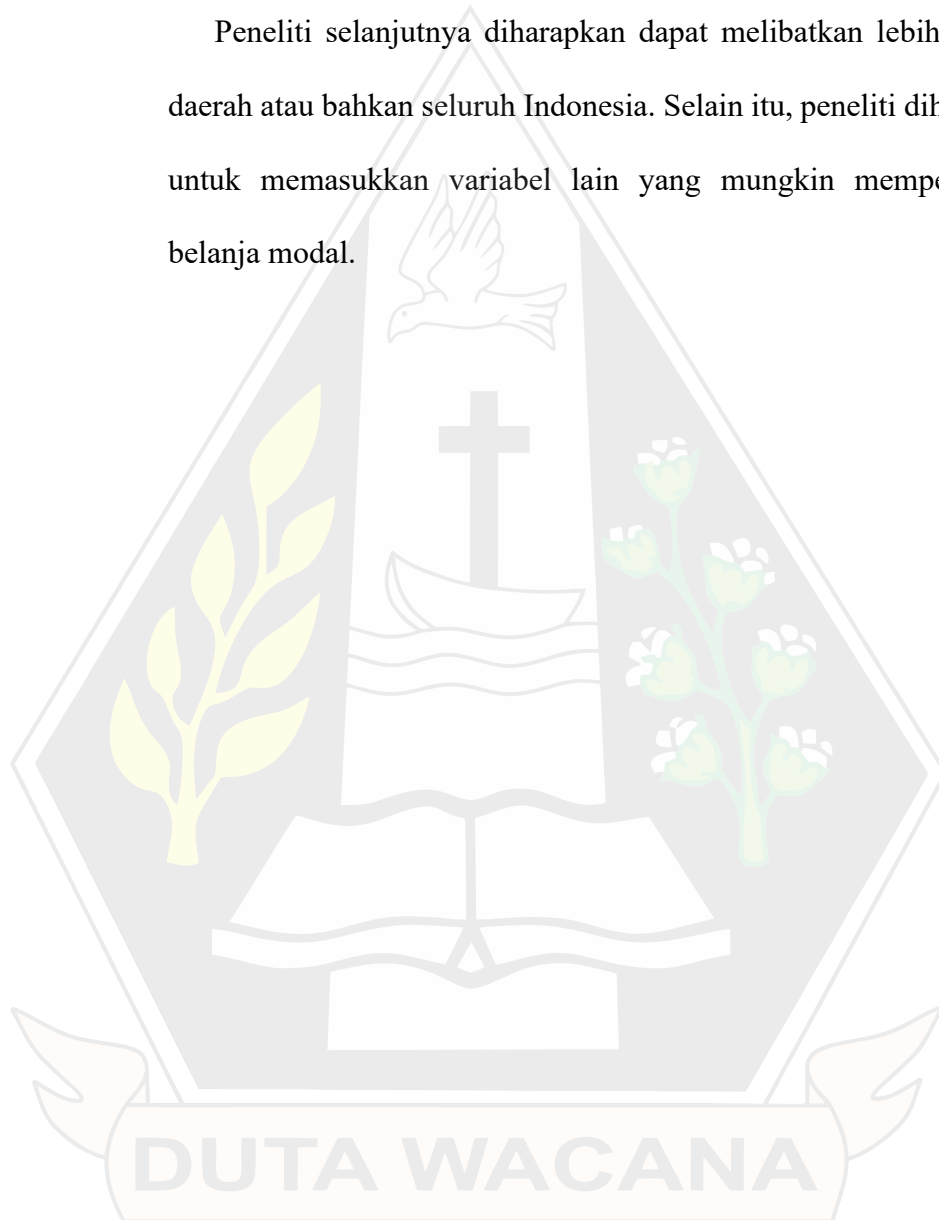
Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dengan meningkatkan dan memperluas sumber-sumber PAD, memperbaiki sistem perpajakan daerah, dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya membayar pajak. Mengingat peran penting DAU dan DAK dalam mendorong BM, pemda harus memastikan dana yang ada digunakan secara efisien dan efektif. Sebelum membuat keputusan tentang alokasi belanja modal, harus ada evaluasi dan analisis menyeluruh.

Diharapkan pemerintah daerah juga untuk melengkapi data-data yang keuangan daerah yang ada di website Badan Pusat Statistik yang

ada di daerah masing-masing. Sehingga penelitian kedepannya mempermudah peneliti dalam hubungan pengambilan data yang ada di daerah masing-masing.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak daerah atau bahkan seluruh Indonesia. Selain itu, peneliti diharapkan untuk memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi belanja modal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Analisis Regresi Linier dengan Aplikasi SPSS. Pustaka Cendekia Utama.
- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 No. 2.
- Bappenas. (2011). Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Dana Alokasi Umum. (2017, September). DPR RI. Retrieved March 20, 2024, from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-259.pdf>
- Dana Alokasi Khusus. (2017, September). DPR RI. Retrieved March 20, 2024 from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-256.pdf>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- D. I., Hardiwinoto, & N. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan. *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis*, 111-11
- Diva Ivana, Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ASSET><http://journal.umpo.ac.id/index.php/asset>
- Fadhil Rachmad, A., Azaria, E., Nur Xusan, Q., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS 23 (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Government of Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah [Law No. 23 of 2014 on Regional

Governments]. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun APBD. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233407/permendagri-no-84-tahun-2022>.

Khusaini, Muhammad Dr. 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE Universitas Brawijaya. Malang

Kusnandar, & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Belanja Modal.

Litvack, Jennie. 1999. Decentralization. World Bank. Washington DC

Mayeztika. (2010) halaman 11. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Modal Belanja. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Moisio, A. (2002). Essays on Finnish municipal finance and intergovernmental grants. Government Institute for Economic Research.

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.

Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/>. Retrieved May 11, 2024.

Rahajeng, A. S., Ignatia Martha Hendrati, S. E., & Kiki Asmara, S. E. (2021). D. Pengaruh Pajak Daerah, Dau, Dak Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(1), 30-30.

Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).

Simanjuntak Arthurs, & Christina G Mithas. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN

DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH.
JURNAL MANAJEMEN, 5

Sulistyaningsih, I., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8.

Sulistiyowati, D. (2011). *PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL*.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Pengantar Statistika Edisi ke-2* (2nd ed.).
https://library.ikipgunungsitoli.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2058

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia.

